

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Romson Oskoro Purba**

Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah pengaturan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, proses pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan Probematika pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan bagaimana mengatasi probematika permasalahan tersebut.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Proses pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undang kepemiluan. Secara garis besar proses PSU Pasca Putusan MK, KPU menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Probematika pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dapat dilihat dari integritas dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Pelanggaran yang banyak terjadi salah satunya tidak menandatangani surat suara sebelum melakukan pemungutan suara oleh pemilih. Dampak dari PSU ini membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilu Calon Anggota DPRD di Dapil Samosir I. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan PSU agar rasa keadilan dan asas pemilu di terapkan dengan sebaik-baiknya.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REVOTING IN SAMOSIR REGENCY IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION**

**Romson Oskoro Purba**

*A revote will only be held if there are data discrepancies, technical errors, or suspected legal violations that could affect the vote results.*

*The research problem in this thesis is the regulation of the revote following the Constitutional Court Decision, the process of implementing the revote following Constitutional Court Decision Number 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, and the challenges of implementing the revote following Constitutional Court Decision Number 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, and how to address these issues.*

*This research uses a descriptive-analytical approach. The type of research employed is normative juridical, utilizing literature studies and qualitative data analysis, resulting in descriptive-analytical data.*

*The process of implementing the revote following Constitutional Court Decision Number 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 was carried out in accordance with election laws. In general, the process of the Revote After the Constitutional Court Decision, the General Election Commission prepares and determines the schedule for the revote by taking into account the Constitutional Court's decision, and plans the budget requirements for the revote after the Constitutional Court's decision. The schedule for the revote is determined by the Decree of the General Election Commission. The flow of the revote after the Constitutional Court's decision is determined by the Decree of the General Election Commission. The problematic implementation of the revote after the Constitutional Court's decision Number 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 can be seen from the integrity and professionalism of the election organizers starting from the General Election Commission to the performance of the Voting Organizer Group which continues to be in the spotlight of the public regarding various issues. One of the violations that often occurs is not signing the ballot before voting by voters. The impact of this Revote cancels the decision of the General Election Commission regarding the determination of the election results for Candidates for Members of the Regional People's Representative Council in the Samosir I Electoral District. Therefore, it is necessary to carry out a Revote so that a sense of justice and election principles are implemented as well as possible.*

**Keywords: Legal Analysis, Revote, Constitutional Court**